



LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

# L K P D

## PENDIDIKAN PANCASILA



"Analisis kasus hukum dengan kacamata Konstitusi"



Nama : .....  
Kelas : .....  
No. Absen : .....

KELAS  
**X**



## Tujuan Pembelajaran

Setelah mengerjakan LKPD ini, peserta didik diharapkan dapat :

1. Menjelaskan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022.
2. Menganalisis konflik antar peraturan berdasarkan asas lex superior derogat legi inferiori.
3. Mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang dilanggar dalam penyusunan peraturan.
4. Menunjukkan hak konstitusional yang dilanggar akibat peraturan yang bertentangan.
5. Menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat untuk menguji keabsahan peraturan yang dinilai tidak sesuai.



## Petunjuk Pengerjaan LKPD

- 1 Bacalah studi kasus yang disediakan secara cermat dan teliti.
- 2 Jawablah setiap pertanyaan di bawah studi kasus berdasarkan pengetahuan, pemahaman materi, dan nalar hukum kalian.
- 3 Gunakan kalimat sendiri dan sertakan dasar hukum dan juga teori
- 4 Tugas ini dapat dikerjakan secara individu
- 5 Hasil kerja ditulis langsung di lembar jawaban atau dikumpulkan melalui tautan online
- 6 Jaga kejujuran akademik dan hindari plagiarisme.



## Ringkasan Materi

A. Hierarki Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022)

Menurut Pasal 7 ayat (1), urutan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
3. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (Perpres)
6. Peraturan Daerah (Perda Provinsi/Kabupaten/Kota)

Implikasi : Semakin rendah peraturan dalam hierarki, maka harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

B. Asas dan Prinsip dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Sesuai Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan disusun berdasarkan asas :

- Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan (huruf c)
- Dapat dilaksanakan (huruf f)
- Kejelasan tujuan dan rumusan
- Keterbukaan dan keadilan

Jika suatu peraturan tidak sesuai dengan prinsip tersebut, maka dapat dibatalkan melalui mekanisme hukum.

C. Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori

Merupakan asas hukum tata negara yang menyatakan bahwa :

> Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Contoh : Perda atau Perpres tidak dapat bertentangan dengan UU, dan UU tidak dapat bertentangan dengan UUD 1945.

#### D. Hak Konstitusional Warga Negara

Dalam UUD 1945, beberapa pasal penting yang melindungi hak konstitusional warga :

- Pasal 28D ayat (1): Hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang adil.
- Pasal 28H ayat (1): Hak atas lingkungan hidup yang sehat dan pelayanan kesehatan.
- Pasal 28G ayat (1): Hak atas rasa aman dan perlindungan hukum.

#### E. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Peraturan

Jika suatu Perda atau Perpres dianggap bertentangan dengan peraturan di atasnya, masyarakat dapat melakukan:

- Uji Materiil ke Mahkamah Agung (MA): Untuk peraturan di bawah UU seperti Perda dan Perpres.
- Permohonan pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri: Terutama untuk Perda yang dianggap bermasalah.
- Dasar Hukum: Pasal 31 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

#### F. Pengelolaan Aset Negara (UU No. 17 Tahun 2003)

Harus dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel

Pasal 45: Menyebutkan bahwa kerja sama jangka panjang terkait aset negara harus melibatkan persetujuan DPR bila melewati batas tertentu.

Akses video materi pembelajaran :





## TUGAS

### KASUS 1

Pemerintah Provinsi Cemerlang mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda Provinsi) yang menetapkan larangan penggunaan kendaraan bermotor pribadi di hari Jumat untuk seluruh masyarakat, kecuali untuk keperluan darurat. Tujuannya adalah mengurangi polusi udara dan mendorong penggunaan transportasi umum.

Namun, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak terdapat larangan semacam itu. Sebagian masyarakat pun merasa aturan ini membatasi hak mobilitas mereka yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### Pertanyaan:

1. Bagaimanakah kedudukan Peraturan Daerah dalam tata urutan peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022?
2. Apakah sah Perda Provinsi tersebut jika bertentangan dengan Undang-Undang? Jelaskan menggunakan asas hierarki norma hukum!
3. Sebutkan prinsip dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam kasus tersebut dan pasal yang mengaturnya!
4. Hak konstitusional apa yang mungkin dilanggar oleh kebijakan larangan kendaraan pribadi tersebut? Sebutkan pasalnya dalam UUD 1945!
5. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk membatalkan atau menguji keberlakuan Perda tersebut?

#### Jawaban





## KASUS 2

Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden tentang pengaturan kerja sama pemerintah dengan swasta dalam proyek infrastruktur. Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa perusahaan asing dapat memperoleh hak pengelolaan aset negara hingga 50 tahun.

Namun, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan aset negara wajib diawasi dan dibatasi dalam jangka waktu tertentu serta harus melalui persetujuan DPR jika melebihi batas waktu tertentu. Beberapa pihak mempertanyakan keabsahan Perpres tersebut karena dianggap melewati kewenangan legislatif.

### PERTANYAAN :

1. Bagaimana kedudukan Peraturan Presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022?
2. Apakah Peraturan Presiden dapat mengesampingkan ketentuan dalam Undang-Undang? Jelaskan dengan teori lex superior!
3. Jika terjadi konflik antara Peraturan Presiden dan Undang-Undang, mekanisme hukum apa yang dapat ditempuh untuk menyelesaiakannya?
4. Prinsip perundang-undangan manakah yang dilanggar dalam kasus tersebut? Sebutkan dan jelaskan pasalnya!
5. Bagaimana seharusnya pengelolaan aset negara dilakukan menurut UU No. 17 Tahun 2003? Jelaskan pasal yang relevan

### Jawaban





Evaluasi tingkat kesulitan soal

Menurut kamu, bagaimana tingkat kesulitan soal-soal dalam LKPD ini?

- 1. Sangat mudah
- 2. Mudah
- 3. Sedang
- 4. Sulit
- 5. Sangat Sulit

Alasan Jawabanmu : .....

.....  
.....



Catatan Guru

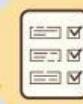


Nilai

Predikat

Tanda tangan guru

## Rubrik Penilaian



No.	Aspek Penilaian	Deskripsi	Skor	Skor Jika Jawaban Kurang/Salah
1.	Ketepatan Jawaban Hukum	Jawaban menunjukkan pemahaman yang tepat terhadap isu hukum dan sesuai dengan pertanyaan.	4 poin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 (kurang tepat)</li> <li>• 0 (salah total)</li> </ul>
2.	Penggunaan Dasar Hukum/Theori	Menyebut pasal/UU/theori hukum yang relevan dan benar	3 poin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (Hanya menyebut saja dan tepat)</li> <li>• 0 (Hanya menyebut saja tapi tidak tepat atau Tidak ada dasar hukum)</li> </ul>
3.	Argumentasi / Penalaran	Penjelasan logis yang mendukung jawaban berdasarkan hukum	2 poin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (Argumen kurang jelas)</li> <li>• 0 (Tidak ada argumentasi)</li> </ul>
4.	Kerapian dan Struktur Jawaban	Susunan kalimat rurut, mudah dipahami	1 poin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (tidak rurut / tidak jelas)</li> </ul>
Total Skor		Jumlah Seluruh Skor per soal	10 poin	

### PREDIKAT

A = (90 - 100)  
 B = (80 - 89)  
 C = (70 - 79)  
 D = (60-69)  
 E = (<60)

### Langkah Evaluasi Online :

1. Siapkan HP atau perangkat lain yang mendukung.
2. Scan QR Code berikut atau salin link yang tersedia.
3. Isi evaluasi dengan jujur dan sesuai pemahamanmu.
4. Isi identitas yang sesuai



### Evaluasi Online



Silakan scan QR Code di bawah ini untuk mengerjakan evaluasi secara online :